

KONSEP PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN BERBASIS MADRASAH

Muh. Sakir

Pascasarjana Universitas Sain Al-Qur`an (UNSIQ) Wonosobo

Abstract: *Along with the change of educational management paradigm from centralized to decentralized system, every school is given a wide range of opportunities to establish and develop its own potential resources to improve the quality of education. As part of the national education system, Madrasah is inevitably demanded to transform itself into a better quality in response to the aforementioned change in order to be able to compete with public schools. Hence, the managers of Madrasah or Islamic schools must be aware that the power-based approach that they have employed is not relevant anymore to cope with the needs of the rapid change in our educational system. For this reason, it is essential to accommodate a myriad of constructive ideas from various parties for the improvement of Madrasah. In accord to this, Madrasah-based or Islamic-based school management is obviously required with regard to the professionalism and contextual-rational paradigm by applying the bottom-up model in deciding the policies. Besides, human resources management should also be adjusted professionally basing on the academic competency standards with the restriction of personal interest. Furthermore, it requires the development of sustainable curriculum so as to adjust the improvement of science and technology.*

المخلص: مسابرة بتغير النموذج في تنظيم التربية من المدخل المركزي إلى المدخل اللامركزي، فإن المؤسسات التربوية في الوحدات التربوية يمنح لها السعة في تنسيق وتنمية مواردها وطاقاتها لتنمية جودة التربية. فالمدسة - كعنصر من نظام التربية الوطني لابد من إصلاح نفسها للوصول إلى ما هو أحسن. ونتيجة من تلك التغيرات فإن المدسة - في المستقبل - تكون قادرة في أن تنافس المدارس غير الإسلامية . بهذا إذن يجب أن يعي المسؤولون في المدارس الإسلامية أو التربية الإسلامية بأن إدارة المدسة لا تصلح بالمدخل السلطي، لأنهم سيواجهون أنواعا من التغيرات. فيحتاج لهذا إلى الوعي الجماعي لقبول المداخلات والآراء من الجهات الأخرى لتكون هذه منطلقا لتنمية جودة المدسة. ويحتاج هذا إلى التغيير في الإدارة على أساس المدسة أو التربية الإسلامية على المدخل المهني والسياقي - العقلي على أساس هذه المداخلات والآراء. وإدارة الموارد البشرية يجب أن تناسب الكفاءة المهنية على أساس الكفاءة الأكاديمية حتى لا يعمل بالقرب الفردي فقط. وبجانب ذلك هناك متطلبات لتنمية وتغيير المنهج الدراسي المتواصل حتى تتكيف بالتقدم المعرفي والتكنولوجي.

Keywords: Madrasah education, quality of education, education management

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan *ilmu pengetahuan* dan *teknologi*. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi.

Walaupun madrasah secara historis adalah bentuk kegiatan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat muslim. Tetapi dalam perkembangannya madrasah secara pengelolaannya masih membutuhkan peningkatan dan pengembangan agar supaya bisa menjadi sekolah yang unggulan. Oleh karena itu posisi madrasah merupakan lahan atau lembaga pendidikan yang strategis untuk mempersiapkan generasi masa depan Indonesia yang membekali konteks iman, ilmu dan akhlak yang sampai sekarang masih dalam bentuk wacana dan belum dapat diwujudkan.

Di samping itu, sebagian besar madrasah masih dikelola dengan apa adanya yang penting pelaksanaan pembelajaran berjalan. Tanpa adanya pendekatan-pendekatan manajemen modern yang berorientasi mutu. Hal ini bisa dilihat dari banyak madrasah-madrasah yang dikelola oleh umat Islam yang berbasis masyarakat pedesaan. Jumlah madrasah dari tingkat taman-kanak-kanak sampai dengan menengah umum kurang lebih 72.650 buah, dengan jumlah siswa kurang lebih 5.633.940. Hampir secara keseluruhan adalah para siswanya berlatar belakang ekonomi rendah.

Persoalan madrasah ke depan adalah bagaimana mempengaruhi masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan sebuah terobosan yang mampu membawa madrasah ke arah perubahan yang berkompetisi terhadap sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu, di dalam pengembangan mutu madrasah juga tidak bisa dilepaskan aspek keberadaan sejarahnya dan juga bagian dari sistem pendidikan nasional dan bagian dari perkembangan global.

MADRASAH SEBAGAI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang eksistensinya tidak bisa dilepaskan para ulama atau intelektual muslim Indonesia yang peduli terhadap agama Islam. Dalam bukunya Mahmud Yunus disebutkan bahwa perkembangan pendidikan Islam bisa dibagi kedalam masa awal perintisan, masa awal penjajahan dan pasca kemerdekaan¹. Perjalanan madrasah hingga sampai saat ini masih tarik menarik antara ideologi dan kebutuhan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu posisi madrasah masih dianggap oleh masyarakat adalah kelas dua. Hal ini juga termasuk bagi kalangan umat muslim sendiri. Di satu sisi keberadaan madrasah masih tertutup untuk kalangan umat non muslim, madrasah hanya dimaksuki oleh kalangan umat Islam saja. Maka, madrasah lebih dikenal dengan sebutan sekolah umum yang berciri khas Islam. Jika dilihat sebutan ini, nampaknya sebagian besar umat Islam bahkan lembaga pemerintah dalam hal ini Depag sebagai pengelola madrasah negeri masih mempertahankan ideologinya dari pada kebutuhan praksis. Dengan demikian madrasah akan tetap mengalami kendala psikologis, apabila ada perubahan pengembangan madrasah yang mengindikasikan sekuler.

Hal ini nampak pada pelajarannya pada tahun 1900-1908 yang diajarkan misalnya; *Ilmu Nahu, Ilmu Sharaf, Ilmu Fiqhi, Ilmu Tafsir, Ilmu Tahuid, Ilmu Hadis, Ilmu Musthalah Hadis, Ilmu Mantiq, Ilmu Ma'ani, Ilmu Bayan, Ilmu Badi', Ilmu Usul Fiqh*. Kurikulum ini adalah pembelajaran yang diambil dari sistem pendidikan Timur Tengah pada masa abad pertengahan². Oleh Karena itu, madrasah merupakan kopian dari sistem pendidikan klasik yang dibawa ke masa sekarang.

Namun dalam bukunya Maksun disebutkan bahwa madrasah baru berkembang pada abad XX yang mengadopsi sistem pendidikan mirip dengan Timur Tengah.³ Hal ini disebabkan oleh adanya para pelopor intelektual Islam merupakan tamatan dari Timur Tengah yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia. Ada ahli antropologi agama yang meneliti pendidikan Islam yaitu Karel Steenbrink mengidentifikasi bahwa ada empat faktor yang melatar belakungnya pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad XX di antaranya adalah;

1. Faktor keinginan untuk kembali kepada al-Quran dan al-Hadis.
2. Faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah.

¹ Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta, Mutiara, 1979)

² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 54.

³ Maksun, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta, Logos, 1999), 97

4. Muh. Sakir, *Konsep Pengembangan Mutu Pendidikan Berbasis Madrasah*
3. Faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
4. Faktor pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.

Keempat faktor tersebut di atas, tidak serta merta mendorong pembaharuan Islam di Indonesia, melainkan bahwa gerakan pembaharuan yang terjadi di Indonesia menurut Karel mempunyai motif yang berbeda⁴.

Apapun yang dikatakan oleh Karel, yang jelas ada keinginan yang kuat dari para ulama atau intelektual muslim Indonesia untuk memperbaiki keadaan umat Islam di Indonesia yang masih belum memahami ajaran Islam secara benar. Oleh karena itu pendirian pendidikan atau madrasah merupakan salah satu hal pokok bagi pemahaman al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Namun dalam perkembangannya madrasah tidak hanya sebagai pembelajaran Islam, tetapi sudah berubah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama Islam, namun juga pengetahuan umum.

Sesuai dengan SKB tiga Menteri, akibat dari Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 ini pemerintah mengambil kebijakan terhadap pengembangan dan kebijakan kepada madrasah. Yang pada gilirannya ketiga menteri tersebut adalah Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri bersama-sama ikut tanggung jawab dalam pembinaan madrasah. Adapun isi dari Kepres No. 34 Tahun 1974 dan Inpres adalah:

1. Pembinaan Pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Pendidikan Agama tanggung jawab Menteri Agama.
2. Untuk Pelaksanaan Kepres No. 4 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P & K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

Berdasarkan Kepres dan Inpres di atas memberikan gambaran bahwa keberadaan madrasah sudah memiliki posisi yang sama dengan sekolah umum, walaupun harus menyesuaikan kurikulum yang diajarkan oleh sekolah umum. Oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum madrasah di susun komposisi sekurang-kurangnya 30% mata pelajaran Agama dan 70% untuk mata pelajaran umum.

Tidak hanya berhenti pada SKB tiga menteri, untuk perbaikan dunia pendidikan, disusun UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 2 Tahun 1989, ini juga mempertegas keberadaan Madrasah,

⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta; LP3ES, 1994), 27-29

seperti yang dinyatakan bahwa “pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.372 tahun 1993, tentang kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.⁵

Dengan demikian madrasah di semua tingkat merupakan jalur sekolah yang melaksanakan kurikulum sekolah nasional. Adapun mata pelajaran yang diajarkan di madrasah di antaranya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan mata-mata pelajaran yang merupakan muatan lokal. Untuk menunjukkan bahwa madrasah adalah pendidikan umum yang berciri khas Islam, maka pendidikan agama dipecah menjadi beberapa mata pelajaran diantaranya adalah Qur’an dan Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqh, Bahasa Arab, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Semua ini adalah untuk membentuk kepribadian muslim.

PENGEMBANGAN MADRASAH BERBASIS MUTU

Pengertian tentang mutu merupakan sesuatu yang semu, sebab mutu dalam pengertian seseorang sangat subyektif. Namun ada yang mengartikan bahwa mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi atau kesesuaian terhadap standart.⁶ Pengertian ini adalah mengandung pemahaman yang statis, padahal mutu merupakan sasaran yang bergerak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan.

Konsep mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangibile*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada *proses pendidikan* dan *hasil pendidikan*. Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai *input*, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.⁷ Manajemen sekolah, dukungan

⁵ Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung, Mizan, 1999), 91.

⁶ Juran, “Juran On Quality By Design”, terj. Bambang Hartono, *Merancang Mutu*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995), 12.

⁷ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), 14-18.

kelas berfungsi mensinkronkan berbagai *input* tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtransi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Ebta atau Ebtanas). Atau juga pula prestasi di bidang lain, misalnya; prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya; komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah/madrasah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan.

Dalam konteks pendidikan, mutu dikaitkan dengan efektifitas suatu lembaga. Oleh karena itu, mutu dalam pendidikan mencakup input, proses, out put pendidikan.⁸ Madrasah yang unggul tentu madrasah dengan pengelolaan yang mengedepankan mutu di segala bidang. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama* strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (baca; madrasah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat/wilayah) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (madrasah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan harus berbasis sekolah/madrasah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis

⁸ Slamet., PH., *Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Sekolah*, (Jakarta, BAN Depdikans, 2002), 21.

sekolah (*School Based Quality Management*) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (*developmental*) disebut *School Based Quality Improvement*. Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing ini berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah/madrasah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mandiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Madrasah yang bermutu dan berkualitas merupakan langkah awal untuk bersaing di era global ini. Untuk itu, perlu pengembangan madrasah berbasis mutu. Pengembangan madrasah yang berbasis mutu adalah segala usaha yang terus-menerus melalui manajemen diberbagai komponen madrasah, baik dari sisi manajemen perencanaan madrasah, manajemen sumberdaya manusia, manajemen kurikulum atau pembelajaran dan manajemen keuangan, serta manajemen evaluasi, serta manajemen pengembangan. Oleh karena itu,

berhasil tidaknya madrasah menjadi unggul dalam segala hal, ditentukan oleh manajemen pengelolaannya.

Untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pemberdayaan pendidikan yang lebih berkualitas. Usaha tersebut diantaranya adalah melalui pengembangan dan perbaikan diberbagai komponen pendidikan yaitu; kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Di samping itu, mengingat madrasah sebagai unit pelaksana pendidikan formal yang berciri khas Islam terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya *benchmarking*). Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*School Based Quality Management*) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (*developmental*) disebut *School Based Quality Improvement*.

Tujuan dari pengembangan manajemen madrasah yang berbasis mutu adalah:

1. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah khususnya kepada masyarakat.
2. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat yang

memiliki keragaman kultural, sosio-ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.

3. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.
4. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada madrasah masing - masing.
5. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.
6. Memotivasi timbulnya pemikiran-pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.
7. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tataran sekolah.
8. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, sampai lima tahun, sehingga tercapai misi madrasah ke depan.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas madrasah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori *effective school* yang lebih memfokuskan pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut;⁹

1. Lingkungan madrasah yang aman dan tertib.
2. Madrasah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai.
3. Sekolah/madrasah memiliki kepemimpinan yang kuat.
4. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala madrasah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi.
5. Adanya pengembangan staf madrasah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK.

⁹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung, Rosda Karya, 2004), 89

6. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu.
7. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ini diharapkan madrasah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu antara lain: *Pertama* adalah dari segi sumber daya, artinya sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk orientasi memperkuat madrasah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan pengurangan kebutuhan birokrasi pusat. *Kedua* adanya pertanggung-jawaban (*accountability*) madrasah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (*accountability*) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu. *Ketiga* adanya penerapan kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, madrasah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (*content*) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, madrasah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional.

Oleh karena itu, madrasah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam

pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa hanya sekolah yang dikelola secara efektif (dengan manajemen yang berbasis sekolah) yang akan mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus menyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa atau *out put* (lulusan).

PENUTUP

Madrasah sebagai bentuk sekolah formal yang bercirikan khas Islam, mau tidak mau dihadapkan pada persoalan pengembangan mutu untuk menghadapi tuntutan jaman. Mengingat sampai sekarang sebagian besar madrasah masih dikelola dengan cara-cara tradisional dengan pendekatan kekuasaan sehingga hanya duduk ditempat atau sekedar rutinitas para pengelola yang *sok* mampu mengelola madrasah, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan baik secara akademik maupun teoritis manajemen sehingga keberadaan madrasah akan selalu ketinggalan dan kalah bersaing apalagi untuk bertahan saja sudah kesulitan.

Untuk itu, pada era sekarang madrasah perlu dilakukan perubahan yang mendasar terutama dari beberapa sisi yang penting diantaranya adalah perubahan manajemen yang dulunya hanya sekedarnya saja perlu dikelola secara rasional-profesional dan modern, dan dibutuhkan perubahan sumber daya manusia yang didasarkan pada kemampuan akademik secara formal memenuhi kompetensinya, di samping itu juga perlu adanya perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan konteks-konteks sosial yang mampu mempersiapkan peserta didik bersaing secara unggul baik dari sisi iman maupun keterampilan akademi dan teknik. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran bersama para pengelola pendidikan Islam khususnya madrasah untuk mau menyadari adanya tuntutan yang harus bersaing

sehingga mereka dituntut meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaannya maupun akademiknya.

Di samping itu dalam pelaksanaan dibutuhkan terobosan-terobosan perubahan pola pikir yang mendasar bai para guru, kepala madrasah dan juga masyarakat yang berkecimpung di pendidikan Islam. Dengan perubahan pola pikir yang rasional dan kontekstual inilah diharapkan dalam pengelolaan madrasah ke depan mampu bersaiang dan bahkan unggul sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mayoritasIslam, yaitu mempersiapkan manusia yang unggul dalam konteks iman yang tangguh dan berwawasan ilmu pengetahuan yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sayibany, Omar Muhamad al-Toumy, *Filsafat Pendidikan Islam*, Penj. Hasan Langgulong, Jakarta: bulan Bintang, 1979.
- Anderson, Carl R., *Management Skill, Func, and Organization Performance* Boston: Inc. Ally and Bacon, 1988.
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Dawam, Ainurrofiq, Pendidikan terpadu Sebagai Sebuah Sistem Pendidikan Nasional Alternatif; Sebuah Pikiran Sederhana, dalam “*Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar, Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya*” Presma Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: al-Maarif, 1992.
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku I Konsep dan Pelaksanaan*, Jakarta: Dirjendikdasmen, 2001.
- Fadjar, Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1999.
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2004.
- Griffin, Ricky W., *Management*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1984.
- Handoko, Hani, *Manajemen* Yogyakarta: BPFE, 2001.

- Juran, *Juran On Quality By Design*, terj. Bambang Hartono, 'Merancang Mutu', Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mukti, Basori dan Sucipto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud, 1992.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung, Rosdakarya, 2003.
- , *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Rahim, Husni, *Arah baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- Rosyadi, Khoiron, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Slamet., PH., *Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Sekolah*, Jakarta: BAN Depdikans, 2002.
- Soepardi, Imam, *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud, 1988.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Stoner, James A. F, G. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert JR., *Management*, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1995.
- Subkhi, Taqiyuddin, "Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Padaherang Ciamis Jawa-Barat" Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Yogyakarta, 2004.
- Terry, Geoge R., *Asas-asas Manajemen*, alih Bahasa Winardi, Bandung: Percetakan Alumni, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.